

Jurnalisme Etis dan Transformatif: Tinjauan Akademik untuk Program Studi yang Distingtif

Rachmat Baihaky^a ; Study Rizal LK^b

^a UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, rachmat.baihaky@uinjkt.ac.id

^b UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, study.rizal@uinjkt.ac.id

Artikel diterima: 07 Mei 2025; Diperbaiki: 27 Juni 2025; Disetujui: 29 Juni 2025

Abstrak: Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual “jurnalisme etis dan transformatif” sebagai distingsi keilmuan dan praksis yang relevan untuk Program Studi Jurnalistik di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berangkat dari krisis etika dalam ekosistem media digital serta tuntutan untuk menjadikan jurnalisme sebagai sarana dakwah dan pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif terhadap perkembangan akademik Program Studi Jurnalistik di era siber. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan jurnalistik harus melampaui sekadar keterampilan teknis yang secara umum berorientasi ekonomi dan sarat akan kepentingan politik. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika Islam, kritik sosial, dan berorientasi transformasional, Prodi Jurnalistik patutnya diarahkan menjadi pionir dalam pengembangan jurnalisme berbasis nilai di era disrupsi informasi.

Kata Kunci: jurnalistik, etik, tranformasi, digital

Abstract: This research elaborates theoretical frame of “ethical and transformative journalism” as distinctive discipline and skills relevant to the School of Journalism at the Faculty of Da’wah and Communication (FDIKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Given to the ethical crisis within curent media culture, thus the urge to implement journalism skills on proselytization or da’wah (from Arabic da’a means to call) and empowerment, this research inclines to a qualitative approach by using descriptive analysis focusing on the academic foundation at the School of Journalism in current cyber era. This research confirms that journalism should not only concentrate on technical skills with its main orientation to economy and politial minded. By reformulating the discipline, the result of the study envisions the prinsiples of Islamic ethics, critical thinking, and transformation oiredented. In so doing, the School of Journalism is projected pioneering the ethic-based journalism in the era of information disruption.

Key words: journalism, ethics, tranformation, digital

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/jsj.v7i1.48356>

Citation: Baihaky, R., Rizal, S.LK (2025), Jurnalisme Etis dan Transformatif: Tinjauan Akademik untuk Program Studi yang Distingtif, *Jurnal Studi Jurnalistik* (7),1,51-58, doi: 10.15408/jsj.v7i1.48356



Jurnal Studi Jurnalistik is licensed under
Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara radikal cara masyarakat mengakses dan memproduksi informasi. Di satu sisi, demokratisasi media memberi ruang partisipasi publik yang luas; di sisi lain, ia juga memunculkan problem serius seperti misinformasi, ujaran kebencian, serta disrupsi terhadap standar etika jurnalistik. Era ini juga ditandai oleh pergeseran paradigma dari fakta objektif menuju dominasi emosi dan opini pribadi, yang dikenal sebagai era *post-truth*. Dalam lanskap media yang semakin kompleks, pertanyaan tentang kebenaran, tanggung jawab sosial, dan peran media dalam membentuk opini publik menjadi semakin mendesak untuk dijawab.

Dalam iklim berdemokrasi, realitas *post-truth* sejatinya bukan sebuah pengejawantahan yang riil dari prinsip demokrai. *Post-truth* justru mengaburkan nilai kebebasan berpendapat dengan menghadirkan penyusutan informasi yang bersifat subjektif, dan terjebak dalam lingkaran gema yang sama (*echo chamber*).¹ Dinamika informasi saat ini, misalnya telah menciptakan meningkatnya polarisasi di tengah masyarakat, membunuh kritisisme individu, hilangnya empati dan munculnya kbuntuan dialog di tengah kelompok masyarakat yang terbelah.

Fenomena ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap media arus utama, yang sering kali dianggap terkooptasi oleh kekuatan ekonomi dan politik. Sementara itu, media alternatif yang tumbuh di ruang digital tak jarang mengabaikan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, jurnalisme menghadapi tantangan epistemik dan moral yang luar biasa. Institusi pendidikan tinggi, khususnya program studi jurnalistik, memiliki tanggung jawab tidak hanya mendidik calon jurnalis yang cakap secara teknis, tetapi juga membentuk agen perubahan yang menjunjung tinggi etika,

integritas, dan keadilan sosial.

Program Studi Jurnalistik FDIKOM UIN Jakarta memiliki keunggulan kontekstual untuk menjawab tantangan tersebut. Sebagai bagian dari kampus keislaman dengan tradisi keilmuan dan nilai-nilai spiritual, Prodi Jurnalistik dapat mengembangkan paradigma “jurnalisme etis dan transformatif” sebagai bidang keunggulan akademik dan praksis. Konsep ini tidak hanya menjawab problem krisis integritas media, tetapi juga merepresentasikan nilai dakwah, keilmuan, dan pemberdayaan yang selama ini menjadi ciri khas keilmuan dakwah di UIN Jakarta. Dengan demikian, distingsi ini bersifat epistemologis dan praksis, yang memosisikan Prodi Jurnalistik FDIKOM sebagai pionir dalam membangun jurnalisme berbasis nilai di era disrupsi informasi dan *post-truth*.

B. Metode Penelitian

Melalui pendekatan kualitatif, pada tahapan pertama penelitian ini berusaha mengkomparasikan dan menyesuaikan nilai-nilai etis dalam kerja jurnalistik secara umum dengan prinsip etis ke-Islaman. Membandingkan kedua prinsip ini bukan untuk memaksakan antar satu nilai etis objek kajian dengan yang lainnya. Pendekatan komparasi ini justru ingin menekankan bahwa kedua variabel kajian memang bekerja pada prinsip-prinsip etis yang sesuai dengan nilai dasar terhadap praktik dan tujuannya masing-masing. Pengumpulan data pada penelitian ini sepenuhnya mengandalkan pada kajian pustaka dan wawancara. Penganalisaan data menggunakan pendekatan triangulasi data analisis deskriptif. Data-data yang bersifat dokumentasi dikumpulkan dan diseleksi dengan mempertimbangkan fokus pembahasan topik penelitian, sedangkan informasi hasil wawancara dilakukan dengan informan Helmi Hidayat selaku akademisi dan wartawan senior nasional.

¹ Peter Törnberg, (2018). Echo chambers and viral misinformation: Modeling fake news as complex contagion. *PloS one*, 13(9), e0203958

C. Hasil dan Diskusi

Jurnalisme Etis: Pilar Moralitas Profesi

Etika merupakan fondasi utama dalam profesi jurnalistik. Dalam kode etik Dewan Pers Indonesia (KEJ), jurnalis dituntut untuk menyajikan informasi secara akurat, berimbang, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi privasi serta martabat manusia. Namun dalam praktiknya, tekanan algoritma, persaingan pasar, dan intervensi pemilik media membuat nilai-nilai tersebut sering kali diabaikan, bahkan dikompromikan.

Jurnalisme etis menekankan independensi, akuntabilitas, dan komitmen pada kebenaran sebagai inti profesi. Etika bukan sekadar aturan prosedural, tetapi refleksi moral dan tanggung jawab sosial terhadap publik. Dalam tradisi Islam, prinsip seperti *sidq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), *tabligh* (transparansi), dan *'adalah* (keadilan) merupakan dasar yang kuat untuk membangun jurnalisme yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara moral.

Di tengah derasnya arus disinformasi, jurnalis tidak hanya dituntut menyampaikan fakta, tetapi juga menjadi penuntun moral publik yang mampu memilah informasi yang layak disampaikan. Oleh karena itu, jurnalisme etis merupakan bentuk ijtihad profesional yang harus terus diperbarui seiring tantangan zaman. Pendidikan jurnalistik di kampus Islam, seperti FDIKOM UIN Jakarta, harus mampu menanamkan kesadaran ini sejak dini kepada mahasiswa, agar mereka tumbuh menjadi jurnalis yang tidak hanya terampil, tetapi juga beretika dan berkarakter.

Lebih jauh, jurnalisme etis juga harus responsif terhadap konteks sosial-politik di mana ia beroperasi. Di negara-negara berkembang, di mana demokrasi belum mapan dan kebebasan pers masih rentan, jurnalisme etis menjadi benteng terakhir melawan propaganda, korupsi informasi, dan manipulasi opini publik. Maka, peran kampus dalam mencetak jurnalis etis adalah investasi jangka panjang bagi keberlanjutan demokrasi dan peradaban informasi.

Helmi Hidayat selaku akademisi dan jurnalis senior menjelaskan kondisi jurnalis etis semakin mengkhawatirkan terutama ketika dunia memasuki iklim digital informasi, di mana etis menjadi subjektivisme pengguna online. Media-media mainstream pun bekerja sesuai etika dan standard kerja manajemen yang sudah terkontaminasi dengan kepentingan ekonomi dan politik media. Namun demikian, Hidayat memberikan sebuah harapan, di mana kerja etis di dunia jurnalisme bisa dikondisikan dengan pelebagaan nilai dan norma ke dalam kurikulum disiplin ilmu jurnalistik. Pengkondisian ini menurut Helmi merupakan sebuah kemufakatan bersama antara tenaga pendidik, profesional jurnalis, dan tentu saja mahasiswa yang menjalaninya.²

Fenomena Jurnalisme Populer: Indikasi Media Nir-Etis

Jurnalisme populer merupakan sebuah realitas yang bertahan (*existing reality*) yang dicirikan pada beberapa aspek antara lain adalah: 1. Berorientasi ekonomi, 2. Berafiliasi dan bahkan bertujuan politik, 3. Berdedikasi penuh pada kesenangan dan memiliki kecenderungan apatisme keadaban (*civil ignorance*).

Lebih lanjut Langer (1998) dalam *Tabloid Television: Popular Journalism and the Other News*, mengindikasikan beberapa indikator terkair jurnalisme populer dilihat dalam produk medianya antara lain: *sensationalism*, dalam memenuhi kebutuhan ekonominya media massa, terutama televisi, memenuhi produk berita mereka dengan cerita-cerita yang bersifat khebohan. Dalam cirinya, berita yang dipresentasikan cenderung berusaha memikat audiens dengan hal-hal yang bersifat mengundang luapan emosi seperti kegembiraan, kebencian dan kesedihan. Produk informasi semacam ini jelas pendangkalan rasionalitas dan kritisisme warga. Berita-berita yang diracik dengan sensasionalisme juga umumnya dibuat untuk menutupi agenda-agenda besar elit yang dengan sengaja

² Wawancara dengan Helmi Hidayat, akademisi dan jurnalis senior nasional pada 29 Juni 2025.

dimunculkan untuk mengalihkan isu besar yang berkaitan dengan hajat rakyat.

Indikator selanjutnya terkait jurnalisme populer adalah *entertainment focus*, di sini media benar-benar menjadikan institusi budaya mereka sebagai penjaja hiburan. Di mana hiburan sejatinya dihadirkan untuk membunuh keseriusan dan kekeritisan warga. Lebih jauh lagi aspek hiburan dalam media massa diproyeksikan dapat mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan media. Jelas jika porsi hiburan mendominasi isi media dan mengenyampingkan informasi penting, maka peran media sebagai institusi budaya sudah kehilangan prinsipnya sebagai kekuatan *civil society*.

Yang ketiga, indikator media populer adalah *personalization of news*. Pada aspek ini Langer mengungkapkan bahwa media, dalam hal ini televisi, menyoroti berita-berita yang berkaitan dengan individu-individu populer tertentu. Berita-berita ini difokuskan pada urusan-urusan pribadi selebritas nasional dan internasional yang sama sekali tidak berhubungan dengan hajat rakyat banyak. Hal ini tentu saja mengindikasikan keacuan media pada prioritas informasi yang bersinggungan dengan kepentingan umum. Perlu diingat, informasi-informasi semacam ini jelas memberikan daya tarik tersendiri terutama bagi para pengidola figur populer (*fandom*). Ada banyak berita yang mengandalkan *personalization* mengingat pada prose produksinya menjanjikan cara kerja yang sederhana dan tentu saja mendatangkan keuntungan.

Indikator selanjutnya dalam catatan Langer terkait jurnalisme populer adalah *visual domination*. Dengan pendekatan ini media sengaja mempermudah audiens dalam pola konsumsi media mereka. Dengan menampilkan lebih banyak gambar ketimbang narasi yang seharusnya menjadi ulasan lebar terkait sebuah isu, media berusaha mengeliminasi detail-detail informasi yang bersifat naratif dengan lebih banyak tampilan gambar dan foto. Di era digitalisasi seeperti saat ini, kekuatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bisa

memeroduksi lebih banyak gambar dan narasi yang terseleksi, hal ini sekali lagi mengindikasikan itikad media untuk melemahkan daya kritis masyarakat dengan berita-berita penuh gambar dan warna. Dan indikator terkahir adalah kelanjutan dari *visual dominance*, yakni *shorter stories*. Dengan memenuhi kaca televisi dengan lebih banyak gambar ketimbang narasi berita, hal ini tentu saja akan berujung pada pemberitaan yang bersifat singkat dan sederhana. Pembahasan-pembahasan detail dari sebuah informasi lengkap akan ada banyak terbuang dan terabaikan. Bayangkan jika informasi ini terkait hal-hal penting dan perlu diketahui publik, maka akan ada banyak misinformasi di tengah khalayak.

Jurnalisme populer di Indonesia sendiri sebenarnya sudah muncul di era kehadiran televisi swasta pada awal dan pertengahan 1990-an. Dengan munculnya televisi-televisi swasta ini publik berharap akan ada banyak alternatif informasi, edukasi dan hiburan. Hal ini disebabkan selama dekade-dekade awal munculnya televisi pemerintah, Televisi Republik Indonesia (TVRI), publik tidak mendapatkan saluran informasi alternatif kecuali hanya media cetak. Sehingga di awal 1990-an dan seterusnya, publik menyambut gegap gempita pertelevisian swasta yang hadir sebagai saluran alternatif non-pemerintah.

Dengan hadirnya banyak saluran, maka dunia jurnalisme saat ini melahirkan ada banyak figur-figur alternatif baik dari dunia politik maupun hiburan. Pada titik inilah media swasta di Indonesia mengawali jurnalisme populer sesuai dengan indikasi-indikasi yang ditetapkan Langer. Meskipun demikian, manifestasi jurnalis populer pada dekade 1990 masih bersifat permulaan, sehingga informasi-informasi serius, faktual dan detail masih banyak menghiasi layar kaca televisi swasta.³ Hal ini terbukti dengan hadirnya informasi

³ Ghulam Shabir, Ghulam Safdar, Muhammad Imran, Asad Mumtaz, Ashraf Ali Anjum (2015), *Process of gate keeping in media: From old trend to new*. Mediterranean Journal of Social Science, 6(1) (pp. 588-593), Article 588.

yang bersifat independen, komprehensif, dan mendalam bisa menghadirkan wacana baru dalam perpolitikan di Indonesia. Puncak dari hadirnya diskursus serius seperti ini, di tahun 1998, rezim militer Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya dapat dilengserkan, salah satunya dengan kecepatan berita yang faktual, independen dan mendalam.⁴

Namun demikian, memasuki milenium baru, televisi swasta mulai terterpa sindrom jurnalisme populer. Di mana mereka banyak menjajakan informasi-informasi yang bersifat tabloid; dangkal, singkat, bergambar dan tidak sensitif publik. Salah satu fenomena jurnalis populer pada televisi komersil adalah munculnya siaran-siaran trivial yang banyak memakan slot waktu penyiaran sehingga dengan berita yang sama dan terkesan diulang-ulang. Strategi pengulangan berita yang sama pada media terutama jika informasi yang disampaikan sangat menyinggung emosi dan psikologis khalayak. Sebuah realitas media populer yang yang disebut Boortin sebagai *pseudo event*.⁵ Sebuah program yang syarat akan kekosongan makna yang ditampilkan berulang-ulang.

Kehadiran jurnalisme populer tentu memberikan noktah idealitas terhadap jurnalisme transformatif. Realitas ini sekaligus mengindikasikan kelemahan jurnalisme yang seharusnya memegang prinsip-prinsip etis. Pada akhirnya harapan untuk mendapatkan jurnalisme perubahan (*transformative journalism*) yang mendorong percepatan pembangunan masyarakat semakin terpuruk.

Jurnalisme Transformatif: Narasi untuk Perubahan

Istilah “jurnalisme transformatif” merujuk pada pendekatan jurnalistik yang tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga mendorong perubahan sosial. Gagasan ini

⁴ Krishna Sen & David T. Hill, (2007). *Media culture and politics in Indonesia*. Oxford University Press.

⁵ Daniel Boorstin, (1971). *The Image: A Guide to Pseudo-Events in America*, New York: Atheneum. Originally published as *The Image or What Happened to the American Dream?* (1961)

berakar pada pendekatan pedagogi kritis Paulo Freire yang menekankan pentingnya kesadaran kritis (*conscientizacao*) dalam membebaskan masyarakat dari struktur opresif. Dalam konteks jurnalisme, pendekatan ini diwujudkan dalam praktik peliputan yang berpihak pada kelompok rentan, memberdayakan suara-suara yang terpinggirkan, dan membongkar ketimpangan sosial.

Pendekatan ini selaras dengan “advocacy journalism”,⁶ yang secara eksplisit berpihak pada nilai-nilai keadilan sosial dan bertujuan mendorong perubahan melalui liputan yang berorientasi pada pembelaan terhadap kelompok marginal. Sebagaimana dijelaskan oleh Silvio Waisbord (2009), jurnalisme advokasi mempertahankan komitmen etis terhadap kebenaran dan verifikasi meski memiliki keberpihakan moral. Ia juga sejalan dengan “peace journalism”, yang diperkenalkan Johan Galtung (1998), yang menekankan pada pencegahan konflik dan penyelesaian damai melalui bingkai media yang tidak menghasut. Jurnalisme transformatif juga berelasi dengan “liberation journalism”,⁷ yang berkembang

⁶ Rodríguez (2001) mengaitkan “jurnalisme advokasi dengan jurnalisme warga (*citizen journalism*) dan media komunitas yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan perubahan sosial. Waisbord (2009) menegaskan bahwa jurnalisme advokasi merupakan bentuk jurnalisme yang secara eksplisit berpihak pada nilai, tujuan politik, atau agenda sosial tertentu, tetapi tetap mematuhi standar profesional dalam pengumpulan dan verifikasi data. Hackett & Carrol (2006) menyatakan bahwa jurnalisme advokasi adalah salah satu pendekatan dalam tradisi jurnalisme kritis (*critical journalism*) yang mengupayakan transformasi sistem media agar lebih adil dan demokratis. Bill Kovach & Tom Rosenstiel (2007) meski tidak secara khusus membela *advocacy journalism*, mereka menyatakan bahwa “loyalitas jurnalis utama adalah kepada warga”. Ini membuka ruang legitimasi bagi jurnalisme yang mengambil posisi moral terhadap isu-isu penting publik. Dalam kerangka media alternatif, Buckley (2000) mencatat bahwa media komunitas dan independen kerap melakukan jurnalisme advokasi dalam membela hak-hak lokal dan komunitas terpinggirkan—menjadi corong suara yang tidak tersalurkan di media arus utama.

⁷ ‘*Liberation Journalism*’ (Jurnalisme Pembebasan) adalah pendekatan jurnalisme yang berpihak kepada kelompok yang tertindas atau dimarjinalkan, dan bertujuan untuk membongkar struktur ketidakadilan

dalam konteks Amerika Latin sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritarianisme dan ketimpangan struktural.

Lebih jauh, jurnalisme transformatif menempatkan nilai-nilai keberpihakan, keadilan, dan perubahan sebagai inti dari fungsi jurnalistik. Ia tidak netral dalam arti membiarkan ketidakadilan berlangsung, tetapi aktif dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak yang terpinggirkan. Jurnalis transformatif sadar bahwa berita bukan hanya produk informasi, melainkan alat intervensi sosial yang memiliki konsekuensi etis dan politis.

Dalam praktiknya, jurnalisme transformatif dapat diwujudkan melalui liputan mendalam atau “investigative reporting”, yang membongkar penyimpangan kekuasaan dan korupsi; jurnalisme solusi atau “solutions journalism”, yang menyajikan potensi resolusi terhadap permasalahan publik alih-alih hanya memaparkan masalah; serta narasi berbasis komunitas atau “community storytelling”, yang memberi ruang bagi suara-suara akar rumput untuk menentukan narasi mereka sendiri dan memperkuat identitas kolektif mereka di ruang publik. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya isi jurnalistik, tetapi juga memperluas fungsi jurnalisme sebagai instrumen pemberdayaan dan rekonstruksi sosial.

Bagi Prodi Jurnalistik FDIKOM UIN Jakarta, pengembangan jurnalisme transformatif berarti mengintegrasikan dimensi nilai dan dakwah ke dalam kerja jurnalistik secara eksplisit. Ini adalah peluang untuk menjadikan lulusan jurnalistik tidak hanya sebagai tenaga kerja media, tetapi sebagai intelektual publik dan agen perubahan yang mengusung etika, keadilan, dan keberpihakan pada kemanusiaan.

sosial-politik melalui peliputan yang kritis, partisipatoris dan transformatif. Hackett dan Carroll (2006) menyebut jurnalisme pembebasan sebagai bagian dari arus jurnalisme kritis. Rodriguez (2001) mengaitkan ini dengan media warga yang membebaskan narasi publik dari dominasi elit.

Integrasi Nilai Keislaman, Keilmuan, dan Dakwah

Sebagai bagian dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Jurnalistik memiliki peluang unik untuk mengembangkan pendidikan jurnalistik yang mengintegrasikan etika Islam, keilmuan komunikasi, dan nilai-nilai dakwah. Dakwah dalam konteks ini dipahami bukan sekadar penyampaian pesan religius, melainkan sebagai proses transformasi sosial yang adil, dialogis, dan berbasis nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, “jurnalisme dakwah” bukanlah jurnalisme dogmatis, melainkan jurnalisme nilai yang berakar pada prinsip *rahmatan lil 'alamin*.

Model ini sejalan dengan pemikiran para tokoh Mazhab Ciputat seperti Harun Nasution dan Nurholish Madjid yang mendorong rasionalisasi dan pembaruan pemikiran Islam. Azyumardi Azra bahkan menekankan pentingnya jurnalisme sebagai instrumen diseminasi nilai-nilai Islam moderat dan demokratis. Dengan demikian, orientasi etis dan transformatif dalam pendidikan jurnalistik adalah kelanjutan dari misi intelektual Islam progresif yang berakar kuat dalam sejarah UIN Jakarta.

Integrasi nilai ini juga berarti bahwa pendidikan jurnalistik harus memadukan pendekatan teoritik dan praksis yang menempatkan keislaman sebagai sumber etika dan misi keilmuan. Hal ini mencakup penggunaan narasi-narasi Islam progresif dalam bahan ajar, pengembangan riset jurnalistik berbasis nilai-nilai keadaban, serta pelibatan mahasiswa dalam proyek-proyek jurnalisme yang mendukung perubahan sosial berbasis prinsip-prinsip Islam.

Lebih dari itu, integrasi ini akan memperkuat identitas keilmuan Prodi Jurnalistik sebagai bagian dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, sekaligus menjawab tantangan zaman dalam membangun jurnalisme yang tidak hanya komunikatif, tetapi juga transformatif dan bermakna dalam konteks keindonesiaan dan keumatan. Dengan menanamkan etika Islam dalam setiap proses pembelajaran, Prodi Jurnalistik tidak hanya

mencetak jurnalis, tetapi juga intelektual Muslim yang mampu menavigasi dunia informasi secara kritis dan bermartabat.

Rekomendasi untuk Implementasi Akademik

Untuk mewujudkan distingsi ini, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, reorientasi kurikulum: menyusun ulang kurikulum Prodi Jurnalistik agar mengintegrasikan dimensi etika, dakwah, dan transformasi sosial. Mata kuliah seperti Etika Media Islam, Jurnalisisme Keadaban, Jurnalisisme Perdamaian, dan Literasi Post-Truth perlu dihadirkan sebagai fondasi keilmuan.

Kedua, penguatan laboratorium jurnalistik: mengembangkan media praktik berbasis nilai seperti media online kampus yang fokus pada jurnalisisme solusi dan narasi komunitas, serta ruang kreatif untuk konten audio-visual yang berorientasi etika dan pemberdayaan.

Ketiga, kolaborasi strategis: membangun kemitraan dengan media berbasis nilai, LSM, pesantren digital, lembaga riset keislaman, dan komunitas jurnalistik alternatif untuk penguatan wawasan, praktik, dan nilai.

Keempat, integrasi riset dan pengabdian: mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada etika media, literasi digital, dan peran jurnalisisme dalam transformasi sosial berbasis Islam.

Kelima, kegiatan ko-kurikuler berbasis nilai: menyelenggarakan MODIS (*Monthly Discussion for Scholars*) berkelanjutan, pelatihan jurnalistik etis, serta festival dakwah media sebagai ruang diskusi dan praktik jurnalisisme etis-transformatif.

D. Kesimpulan

Jurnalisisme etis dan transformatif bukanlah utopia, melainkan keniscayaan dalam menghadapi era disrupsi informasi, post-truth, dan erosi etika publik. Sebagai institusi pendidikan Islam yang memiliki akar kuat dalam nilai-nilai dakwah dan keilmuan, Prodi Jurnalistik FDIKOM UIN Jakarta berada dalam

posisi strategis untuk menjadi pelopor pendidikan jurnalistik berbasis nilai.

Integrasi antara keislaman, keilmuan, dan transformasi sosial dalam pendidikan jurnalistik bukan hanya bentuk distingsi akademik, tetapi juga kontribusi nyata dalam membangun ruang publik yang sehat, adil, dan bermartabat. Di tengah krisis kepercayaan terhadap media, model jurnalisisme ini menjadi harapan untuk memulihkan kebenaran dan merawat akal sehat publik. Dengan demikian, Prodi Jurnalistik tidak hanya mencetak lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi juga jurnalis Muslim yang etis, transformatif, dan berkontribusi bagi peradaban informasi.

Jurnalisisme etis dan transformatif bukanlah utopia, tetapi sebuah keniscayaan dalam era krisis informasi dan polarisasi. Prodi Jurnalistik FDIKOM UIN Jakarta memiliki posisi strategis untuk menjadi pionir dalam pengembangan model pendidikan jurnalistik yang berbasis nilai, integritas, dan keberpihakan pada kemanusiaan. Ini bukan sekadar keunggulan akademik, tetapi bentuk kontribusi nyata terhadap peradaban media yang adil, inklusif, dan mencerdaskan.

Daftar Pustaka

- Atton, C. (2003). *What is 'Alternative Journalism'?* *Journalism*, 4(3), 267–272.
- Azra, A. (2010). *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Jakarta: Mizan.
- Boorstin, D. (1971) *The Image: A Guide to Pseudo-Events in America*, New York: Atheneum. Originally published as *The Image or What Happened to the American Dream?* (1961)
- Dewan Pers. (2006). *Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.

- Galtung, J. (1998). *High Road, Low Road: Charting the Course for Peace Journalism*. Transcend
- Hackett, R. A. (2011). Therizing News Journalism. In Witschge, T., Anderson, C. W., Domingo, D., & Hermida, A. (Eds.), *The SAGE Handbook of Digital Journalism*. SAGE.
- Hackett, R. A., & Carroll, W. K. (2006). *Remaking Media: The Struggle to Democratize Public Communication*. Routledge.
- Hanitzsch, T. (2007). Deconstructing Journalism Culture: Toward a Universal Theory. *Communication Theory*, 17(4), 367–385.
- Hill, D. T., & Sen, K. (2007). *Media culture and politics in Indonesia*. Oxford University Press.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2007). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. New York: Three Rivers Press.
- McIntyre, K. (2019). *Solutions Journalism: The Effects of Including Solution Information in News Stories About Social Problems*. *Journalism Practice*, 13(5), 20–638.
- Meadows, M., & Ewart, J. (2001). More Than Skin Deep: Australia's Community Media. *Media International Australia*, (100), 102–117.
- Rodríguez, C. (2001). *Fissures in the Mediascape: An International Study of Citizens' Media*. Hampton Press.
- Shabir, G., Safdar, G. Imran, M. Mumtaz, A. and Anjum, A. A. (2015). Process of gate keeping in media: From old trend to new. *Mediterranean Journal of Social Science*, 6(1) (pp. 588-593), Article 588.
- Waisbord, S. (2009). *Advocacy Journalism in a Global Context*. In K. Wahl-Jorgensen & T. Hanitzsch (Eds.), *The Handbook of Journalism Studies* (pp. 371–385). Routledge.
- Ward, S. J. A. (2005). *The Invention of Journalism Ethics: The Path to Objectivity and Beyond*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Törnberg P. (2018). Echo chambers and viral misinformation: Modeling fake news as complex contagion. *PloS one*, 13(9), e0203958.